

LAMPIRAN SATU. RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN SLEMAN

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-					
				2018	2019	2020	2021	2022	
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA									
1. PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB	Adanya Forum PRB daerah yang dibentuk berdasarkan aturan dan mekanisme tentang FPRB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda			X	X	X	
	2. Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan	Adanya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan daerah yang telah mengakomodir peran swasta dan masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Setda			X	X	X	
	3. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	1. Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana secara partisipatif dan melibatkan multipihak	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, BPS						
		2. Adanya aturan daerah yang memperkuat implementasi Rencana Penanggulangan Bencana daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda			X	X	X	
		3. Adanya aturan tentang gugus tugas RPB dalam pengarusutamaan dan monev RPB yang melingkupi setiap pemangku kepentingan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda, Seluruh Institusi Pemda						
	4. Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD	Adanya mekanisme dan prosedur BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasi dan komanda untuk penyelenggaraann PB di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, DPRD, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			XX	XX	XX	
	5. Penguatan Forum PRB	1. Adanya Forum PRB yang berperan serta dalam mempercepat upaya pengurangan risiko bencana daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda						
		2. Adanya SK atau dokumen legalitas Forum pengurangan risiko bencana (FPRB) lainnya untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda			X	X	X	
		3. Adanya mekanisme organisasi - berupa: AD/ART atau Statuta, SOP, Deskripsi tugas dan fungsi masing-masing komponen/struktur, dll - sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda						
	2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	6. Review Peta Bahaya Kabupaten Sleman	Terlaksananya review peta bahaya dengan melibatkan instansi tentang tugas pokok dan fungsi lembaga di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPS, Dinas Lingkungan Hidup			X	X	X
7. Review Peta Kerentanan Kabupaten Sleman		Terlaksananya review peta kerentanan dengan melibatkan instansi terkait tugas pokok dan fungsi lembaga di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinsos, Disdukcapil, BPS, Dinas Lingkungan Hidup			X	X	X	



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
<i>(Sambungan Kegiatan No 2)</i>	8. Review Peta Kapasitas Kabupaten Sleman	Terlaksananya review peta kapasitas dengan melibatkan instansi terkait tentang tugas pokok dan fungsi lembaga di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinsos, Disdukcapil, BPS, Dinas Lingkungan Hidup			X	X	X
	9. Penerapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	1. Adanya pelibatan lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi nonpemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah, untuk mengakomodir pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinsos, Disdukcapil, BPS, Dinas Lingkungan Hidup			X	X	X
		2. Tersusunnya mekanisme pengelolaan penanggulangan bencana Kabupaten Sleman sesuai RPB yang diperkuat dengan aturan daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Bagian Hukum Setda					
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	10. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah	Digunakannya informasi bencana oleh semua pihak sebagai acuan dalam menyusun skenario operasi kebencanaan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan			X	X	X
	11. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	Terbangunnya kemandirian masyarakat dalam mengimplementasikan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan seperti rencana evakuasi, EWS dll	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinsos			X	X	X
	12. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	Adanya aturan dan sumberdaya yang memadai untuk mendukung mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan			X	X	X
	13. Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah	1. Adanya proses saling memanfaatkan antara sistem pendataan di tingkat nasional dan di tingkat daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan					
		2. Adanya sistem pendataan daerah yang terintegrasi dengan sistem nasional yang digunakan daerah untuk mendukung perencanaan, pembuatan keputusan, serta program/kegiatan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Perhubungan			XX	XX	XX
	14. Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB	Adanya sumberdaya yang telah tersertifikasi dan dipercaya dalam mendukung respon kejadian bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Basarnas, TNI, Polri	X	X	X		
	15. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	1. Dilakukannya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Basarnas, TNI, Polri					
2. Dilakukannya latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem)		Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Basarnas, TNI, Polri	XX	XX	XX			
3. Terciptanya kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku tentang pentingnya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan		Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Basarnas, TNI, Polri						



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
	16. Peningkatan Kapabilitas Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	Adanya peningkatan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan hasil kajian kebutuhan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri			X	X	X
	17. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	Dilakukannya pengadaan pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan sesuai dengan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri			X	X	X
	18. Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	1. Terpenuhinya kebutuhan tempat penyimpanan/ pergudangan logistik di daerah secara kualitas maupun kuantitasnya	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri			X	X	X
(Sambungan Kegiatan No 3)	19. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	1. Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan <i>supply chain</i> logistik yang diselenggarakan secara periodik	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri					
		2. Terpenuhinya sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan <i>supply chain</i> logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri			X	X	X
		3. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan <i>supply chain</i> pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinsos, Basarnas, TNI, Polri					
	20. Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk	Adanya strategi/mechanisme daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat dengan mempertimbangkan skenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	Utama: PLN Pendukung: ESDM, BPBD, TNI, Polri, Satpol PP			X	X	X
	21. Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana	Tersedianya kebutuhan pangan untuk darurat bencana terparah atau jangka panjang di daerah	Utama: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Pendukung: Dinsos, Bulog, BPBD			X	X	X
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	22. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	Adanya struktur ruang dan pola ruang dalam RDTR untuk mencegah dan mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam PRB	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Bappeda, BPBD	XX	XX	XX		
	23. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana, sister school, penguatan/ rehabilitasi/ pembangunan gedung sekolah, dan tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar	1. Dilaksanakannya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana bagi seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana, di pendidikan dasar sudah berjalan akan tetapi yang perlu pendekatan lebih lanjut adalah untuk kelompok paud (pendidikan anak usia dini)	Utama: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi	X	X	X		



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-							
				2018	2019	2020	2021	2022			
		2. Dilaksanakannya kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) yang difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana	Utama: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi								
	24. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	1. Adanya perencanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana yang mengadaptasi 4 (empat) modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana).	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: RSUD, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	X	X	X					
2. Diterapkannya 4 (empat) modul <i>safety hospital</i> (kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) oleh Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana		Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: RSUD, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman									
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	25. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang penerapan sumur resapan dan/atau biopori yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"								
		2. Adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"						XX	XX	
		3. Adanya kajian untuk menilai efektivitas penerapan sumur resapan dan/atau biopori di daerah dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"								
	26. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang perlindungan daerah tangkapan air yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"								
		2. Adanya penerapan perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"							XX	XX
		3. Adanya kajian untuk menilai efektivitas penerapan perlindungan daerah tangkapan air dalam menurunkan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP"								



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
		frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir						
	27. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	1. Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tentang restorasi sungai yang dikeluarkan oleh pemerintah dan komunitas	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP					
		2. Adanya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP		XX	XX		
		3. Adanya kajian untuk menilai efektivitas kegiatan restorasi sungai dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP					
	28. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	1. Adanya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP		XX	XX		
		2. Adanya kajian untuk menilai efektifitas kegiatan penguatan lereng dalam menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP					
	29. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD, Satpol PP		XX	XX		
(Sambungan Kegiatan No 5)	30. Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB	1. Adanya aturan bangunan tahan gempa bumi di daerah	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP					
		2. Diterapkannya aturan bangunan tahan gempabumi dalam pelaksanaan IMB di daerah	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP		X	X		
		3. Adanya pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan IMB bangunan tahan gempabumi	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP					
	31. Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman di Daerah Berisiko Banjir	Adanya upaya mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk/ taman) di daerah	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP		XX	XX		
6.A. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	32. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi gempabumi	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana gempabumi di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			X	X	



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(Sambungan Kegiatan No 6.A)		2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana gempabumi sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
		3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	33. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	Adanya kegiatan-kegiatan awal dalam penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Banjir di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
		Adanya Rencana kontijensi yang disusun yang tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			X	X	
		Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	34. Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Banjir	Adanya sistem peringatan dini yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: BPBD, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			X	X	
	35. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi bencana Tanah Longsor	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
		2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana tanah longsor sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			XX	XX	
		3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	36. Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Tanah Longsor	Sistem peringatan dini turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya longsor	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			X	X	
37. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sleman	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			XX	XX		



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
		2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
		3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	38. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	1. Adanya rancangan awal untuk membangun sistem peringatan dini Kebakaran Lahan dan Hutan di daerah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kebakaran hutan dan lahan secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			X	X	
		3. Adanya sistem peringatan dini yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kebakaran Lahan dan Hutan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	39. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunungapi melalui Perencanaan Kontijensi	1. Adanya kegiatan-kegiatan awal yang dilakukan sebelum penyusunan rencana kontijensi untuk bencana erupsi gunungapi di daerah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
		2. Adanya Rencana kontijensi yang telah tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunungapi	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			X	X	
		3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana erupsi gunungapi	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
(Sambungan Kegiatan No 6.A)	40. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana erupsi gunungapi Daerah	1. Adanya rancangan untuk membangun sistem peringatan dini Erupsi Gunung Api di daerah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
		2. Dilaksanakannya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana erupsi gunungapi secara berkala oleh multi stakeholder di daerah	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			X	X	
		3. Sistem peringatan dini sudah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Erupsi Gunungapi	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	41. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi	1. Adanya rancangan dan/atau kegiatan awal pembangunan infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri,			X	X	



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
		rencana evakuasi untuk bencana erupsi gunung api yang disusun berdasarkan pengkajian risiko bencana erupsi gunungapi	Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji untuk sistem evakuasi bencana erupsi gunungapi secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPBD, Bappeda, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	42. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana kekeringan di Kabupaten Sleman	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
		2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana kekeringan sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			XX	XX	
		3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	43. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	1. Adanya rancangan untuk membangun sistem peringatan dini Kekeringan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
		2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			X	X	
		3. Sistem peringatan dini sudah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	44. Pembangunan sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrim	Terselenggaranya sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrim yang menyentuh tiap lapisan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh media yang tersedia	Utama: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendukung: BPBD, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan			X	X	X
PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA								
6.B. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	45. Penetapan Status Darurat Bencana	Adanya kebijakan penganggaran terkait ditetapkannya status tanggap darurat dalam penanggulangan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	46. Operasi Tanggap Darurat Bencana	Adanya efektivitas yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan dalam situasi tanggap darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	47. Peningkatan kapasitas TRC dan relawan	adanya penambahan jumlah relawan dan personil terlatih	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan					



KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA			Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	48. Penguatan sarana prasarana untuk evakuasi pengungsi	Tersedianya angkutan atau sarana transportasi yang mendukung penyelenggaraan evakuasi masyarakat	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	49. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	Pulihnya fungsi fasilitas kritis dengan segera (misal 1x24 jam) pada masa tanggap darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	50. Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme	Terjangkaunya masyarakat terjauh dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	51. Penghentian Status Darurat Bencana	Prosedur penghentian status tanggap darurat tersebut mampu mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat (normal kembali)	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos, Dinas Kesehatan					
	52. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	Adanya jaminan kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos					
	53. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Adanya jaminan keberlangsungan fungsi infrastruktur penting pasca bencana di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos					
	54. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Adanya perbaikan rumah penduduk yang telah/sedang dilaksanakan telah mampu secara terukur mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang telah terjadi	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos					
	55. Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru	Terbangunnya budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinsos					

**Untuk Aksi Nomor 45 Sampai 55 Mendapat Perlakuan Khusus Karena Harus Dievaluasi Setiap Tahunnya*

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

